



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Peubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah dan pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang merupakan juga solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Badan Kesatuan dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta

perananannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Painan, 1 September 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



GESTROJONI, S.Pd., M.M.

NIP. 19691106 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU	11
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENTRA PERANGKAT DAERAH.....	11
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	35
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	38
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	42
2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	69
3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	69
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	70
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	70
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	93
BAB V PENUTUP.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Program dan kegiatan dalam rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan membentuk tim penyusun Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholder. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dimana harus ada keseimbangan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* serta *top-down*.

Dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta penyusunan kebijakan lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “ Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol Yang Efisien dan Berkinerja Tinggi Untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM”. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
3. Substansi rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Renstra, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas pertimbangan unsur pemerintahan umum yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
5. Rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Penyusunan dan Penerapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Kasatuan Bangsa dan Politik;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran;

2. Menunjukkan keterikatan antara pencapaian prestasi kinerja yang akan di capai;
3. Menentukan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Menunjukkan keterikatan antara pencapaian prestasi kinerja yang akan dicapai.
6. Meningkatkan efisiensi dan transparansi penganggaran.
7. Meningkatkan flexibelitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keterkaitan antara Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik dengan Renja K/L dan Renja Propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah dan ketentuan peraturan yang mengatur kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengantugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja OPD dibandingkan dengan capaian target kinerja Rencana Strategis OPD.

1. Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target kinerja 100%, realisasi kinerja pada program ini yaitu sebesar 95%, hal ini dikarenakan sub kegiatan pada Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada beberapa yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak terealisasi target kinerjanya karena tidak adanya undangan pelatihan pelatihan intelijen (Pendidikan pelatihan pegawai).
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator program persentase hasil pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat memenuhi target kinerja dikarenakan target kinerja yang direncanakan tidak terlaksana karena tidak ada anggaran.
2. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
- a. Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.19.998.858.085,- dan terealisasi sebesar Rp.1.736.352.851,- (8,68%) Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik capaian kinerja 100%. Dalam pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ini telah dilaksanakan
- 1) Penyaluran bantuan keuangan kepada 13 Partai Politik dan telah diselenggarakannya Bimbingan Teknis oleh 13 Partai Politik terhadap kader dan masyarakat.
 - 2) Penyaluran dana untuk Bawaslu adalah sebesar Rp200.000.000,-, sedangkan untuk KPU adalah sebesar Rp500.000.000,-.

- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi target kinerja sebanyak 63 Ormas dan terealisasi sebanyak 63 Ormas maka capaian kinerja untuk program ini adalah 100%, meskipun tidak adanya anggaran untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini (Rp 0,-).
 - c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial ini memiliki indikator kinerja persentase konflik yang ditangani. Realisasi target kinerja untuk program ini dapat tercapai 100%.
- 3 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- a. Penyelenggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilakukan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan total anggaran Rp. 68.117.800,- dengan realisasi Rp. 68.025.800,- atau 99,86% dengan indikator kinerjanya yaitu: Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya dan tercapainya target kinerja sebanyak 589 Orang maka capaian kinerja pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah 117,8%
- 4 Faktor – faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi capaian capaian target kinerja.
- Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja yaitu :

- a. Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tidak ada anggaran sehingga target kinerja tidak dapat terpenuhi.
 - b. Tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya pemanggilan atau undangan peserta untuk mengikuti diklat intelijen pada program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5 Implikasi yang timbul terhadap capaian target program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang berupaya dalam pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa.

Memperkuat karakter kebangsaan, pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan karakter bagi masyarakat.

Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat perlu untuk di optimalkan guna mencegah merebaknya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, perjudiaan serta pelecehan seksual.

Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai

mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

- 6 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor penyebab tersebut.
 - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Nasional dan fasilitasi/Upaya penanganan konflik sosial.
 - Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk antara lain, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi.
 - Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
 - Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama.
 - Melaksanakan pembekalan bagi operator dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Penyakit Masyarakat lainnya.

- Meningkatkan kehidupan harmoni gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat.
- Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.
- Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	Urusan Pemerintahan Umum									
8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	99,87%	99,87%	100%	99,89%	99,89%
8	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	100%
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	N/A	100%	97,25%	97,25%	100%	95,74%	95,74%
8	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	N/A	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	100%	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	100%
8	01	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	01	2.03	00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	N/A	85%	70%	82,35%	100%	0%	0%

8	01	01	2.05	00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	01	2.05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	N/A	1 Orang	8 Orang	800%	2 Orang	0 Orang	0%
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	N/A	85%	92,26%	108,5%	100%	99,96%	117,6%
8	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	N/A	7 Paket	12 Paket	171,43%	7 Paket	19 Paket	135,7%
8	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	N/A	4 Paket	8 Paket	200%	4 Paket	12 Paket	150%
8	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	N/A	4 Paket	8 Paket	200%	4 Paket	12 Paket	150%
8	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	8 Dokumen	N/A	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	6 Dokumen	75%

						Disediakan								
8	01	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	N/A	1 Laporan	2 Laporan	200%	1 Laporan	3 Laporan	150%
8	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	N/A	4 Laporan	2 Laporan	50%	4 Laporan	6 Laporan	75%
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	85%	N/A	85%	48,22%	56,73%	100%	85,46%	100,5%
8	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	123 Unit	N/A	75 Unit	35 Unit	46,7%	48 Unit	83 Unit	67,48%
8	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	N/A	40 Unit	15 Unit	37,5%	2 Unit	17 Unit	40,48%
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	N/A	100%	93,85%	93,85%	100%	98,07%	98,07%
8	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	150%
8	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	150%

8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	85%	N/A	85%	99,53%	117,09%	100%	99,18%	117,09%
8	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	N/A	4 Unit	3 Unit	75%	1 Unit	4 Unit	80%
8	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Unit	4 Unit	100%
8	01	01	2.09	00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	N/A	10 Unit	18 Unit	55,56%	10 Unit	28 Unit	140%
8	01	01	2.09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	N/A	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	100%
8	01	02			Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	500 Orang	N/A	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	589 Orang	117,8%

8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	42 Upacara	N/A	21 Upacara	19 Upacara	90,48%	21 Upacara	40 Upacara	95,24%
8	01	02	2.01	00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	02	2.01	00 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	02	2.01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	01	02	2.01	00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang	N/A	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	1000 Orang	66,67%
8	01	02	2.01	00 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	02	2.01	00 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	75 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	N/A	85%	113%	132,9%	85%	100%	117/6%
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kegiatan Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen	N/A	2 Dokumen	4 Dokumen	200%	2 Dokumen	6 Dokumen	150%

8	01	03	2.01	00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	03	2.01	00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	01	03	2.01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1100 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	03	2.01	00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	78 Orang	N/A	52 Orang	52 Orang	100	26 Orang	78 Orang	100%

8	01	03	2.01	00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	66,67%
8	01	04			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	63 Ormas	41 Ormas	17 Ormas	17 Ormas	100%	5 Ormas	63 Ormas	100%
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%

8	01	04	2.01	00 01	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	04	2.01	00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	04	2.01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	01	04	2.01	00 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1750 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	04	2.01	00 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100%
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	N/A	85%	85%	100%	85%	100%	117,65%
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	7 Kali	N/A	6 Kali	6 Kali	100	1 Kali	7 Kali	100%

8	01	05	2.01	00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	05	2.01	00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	05	2.01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	80 Orang	N/A	40 Orang	530 Orang	1325%	40 Orang	570 Orang	712,5%

						Daerah									
8	01	05	2.01	00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	05	2.01	00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	100%	
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang ditangani	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%

8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindaklanjuti	100%	N/A	100%	100%	100%	100	100%	100%
8	01	06	2.01	00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	01	06	2.01	00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	01	06	2.01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	01	06	2.01	00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	N/A	60 Orang	675 Orang	1125%	60 Orang	735 Orang	612,5%
8	01	06	2.01	00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	100%
8	01	06	2.01	00 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perauran Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasioal dan penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragamam, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
6. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah			BB (72)	A (81)	A (81,2)	A (81,5)	A (80,26)	A (81,89)	A (81,2)	A (81,5)	
2.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah			100	100	100	100	-	87	100	100	
3.	a. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik			80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik			N/A	30%	30%	35%	N/A	40%	35%	35%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a) Mulai melunturnya / menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada generasi yang di sebabkan oleh :
 - ✓ Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila.
 - ✓ Terjadinya globalisasi dan digitalisasi
 - ✓ Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme
 - ✓ Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideolog, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- b) Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh :
 - ✓ Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat
 - ✓ Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat
 - ✓ Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
 - ✓ Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c) Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh :
 - ✓ Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat beragama
 - ✓ Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru
 - ✓ Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
- d) Masih banyaknya potensi konflik ditengah masyarakat yang dipicu oleh belum optimalnya peran tim dan forum stretegis daerah dalam

mencegah dan menangani konflik dan belum akuratnya data potensi konflik.

- e) Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh :
- ✓ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara.
 - ✓ Rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat
 - ✓ Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik
 - ✓ Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan hasil identifikasi resiko, permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan OPD baik yang bersumber dari internal maupun eksternal diantaranya :

- a. Data dan informasi terkait permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kesbangpol kurang akurat.
- b. Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi disebabkan faktor internal.
- c. Aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang tidak terpantau secara maksimal sehingga muncul ketidaknyamanan ditengah masyarakat akibat aktifitas keagamaan yang dilakukan sekelompok orang yang menyimpang dari ajaran agama.
- d. Keterlambatan pencairan bantuan keuangan partai politik yang menyebabkan pelaksanaan program kerja partai politik terganggu.
- e. Kekurangan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik yang disalurkan menyebabkan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik tidak sesuai regulasi.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan.

- b. Belum optimalnya peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Nagari dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dikecamatan yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan berkurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat didaerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi diseluruh Indonesia.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap pencapaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

Visi pembangunan Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima waktu yaitu tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi pembangunan nasional, dari 9 arah kebijakan tersebut Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yaitu pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui strategi :

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan eksternal :

a) Kondisi Internal

- ✓ Ketersediaan sumber daya aparatur yang handal dan berkompotensi belum mencukupi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- ✓ Kurang proporsionalnya ketersediaan anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja
- ✓ Sarana dan prasarana aparatur belum mencukupi

b) Kondisi Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

- ✓ Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik masih rendah
- ✓ Masih tingginya potensi konflik horizontal di masyarakat
- ✓ Dampak globalisasi yang dapat menurunkan nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
- ✓ Masih tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- ✓ Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian dokumen.

- ✓ Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan propinsi lain yang kaya sumber daya alam

Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- Penambahan kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mejadi luas.
- Adanya dukungan dari instansi terkait dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Adanya Peraturan PerUndang-Undangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata di Pesisir Selatan sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah
- Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 terdapat perbedaan pagu anggaran dengan pagu anggaran hasil analisis kebutuhan hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.3.1. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Pesisir Selatan			5.870.708.145					14,573,595,409	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	3.370.708.145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	4,692,307,571	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	37.451.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	130,000,000	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.451.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	

			SKPD								
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,000,000	
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.444.462.171	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,524,775,691	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	2.324.102.171	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	2,345,766,181	
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139,009,510	

c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000	
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	20,000,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85%	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85%	125,000,000	
a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
b.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
c.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	20,000,000	

			Barang Milik Daerah SKPD								
d.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	
e.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	
f.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	
g.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	180,000,000	
a.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	50,000,000	

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

b.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	10,800,000	
c.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000	
d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000	
e.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000	
f.	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	20.000.000	
g.	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	0	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	20.000.000	
h.	Pemindahan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	0	Pemindahan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	20.000.000	
i.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	20.000.000	

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

j.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.000.000	
k.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	308.499.835	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	503,951,959	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.540.877	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10,433,595	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	
d.	Penyediaan Bahan Logistik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.133.562	Penyediaan Bahan Logistik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23,657,691	
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	22.948.396	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	31,883,983	

f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11,009,000	
g.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.164.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	19,631,370	
h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	246.713.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	292,336,320	
i.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	40,000,000	
j.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	35,000,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	85%	24.836.250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	85%	344,687,736	
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	40,000,000	

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40,000,000	
c.	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	28 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	43 Unit	92,743,980	
d.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6.354.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	111,943,756	
e.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	20,000,000	
f.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	
g.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	363.718.389	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	388,856,897	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000	

b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	37.401.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	44,264,800	
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40,000,000	
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	326.317.389	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	284,592,097	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	85%	191.740.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	85%	515,035,288	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.090.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100,649,288	
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	43.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	35,000,000	
c.	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pesisir	Jumlah Mebel yang	10 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pesisir	Jumlah Mebel yang Dipelihara	37 Unit	15,000,000	

		Selatan	Dipelihara				Selatan				
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14,250,000	
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40,000,000	
f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300,136,000	
g.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000	
B.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	500 Orang	922.199.800	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	500 Orang	1,735,462,254	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	21 Upacara	922.199.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	21 Upacara	1,735,462,254	

a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	499.800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	50,000,000	
b.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	50,000,000	

c.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25 Orang	500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	95,000,000	
d.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	118.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	327,967,944	

e.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	500.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 Laporan	85,000,000
f.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	500.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	75 Keluarga	180,000,000
g.	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	500.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	10,000,000

h.	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paskibraka	73 Orang	800.000.00	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paskibraka	73 Orang	907,494,310	
i.	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	400.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10,000,000	
j.	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	400.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10,000,000	
k.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	73 Orang	400.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	73 Orang	10,000,000	
C.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Pemahaman Politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	1.235.836.614	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Pemahaman Politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	3,630,751,453	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	2 Dokumen	1.235.836.614	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	2 Dokumen	3,630,751,453	

			dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah							
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	400.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	150,000,000
b.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	400.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	50,000,000

c.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1100 Orang	500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1100 Orang	2,000,000,000	
d.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Orang	1.233.536.614	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26 Orang	1,109,608,573	

e.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	301,142,880	
f.	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	500.000	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	20,000,000	
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	83 Ormas	70.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	83 Ormas	448,643,860	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	83 Ormas	70.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	83 Ormas	448,643,860	
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	2 Dokumen	500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	35,000,000	

			Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun							
b.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	500.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	20,000,000
c.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	13 Orang	500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65 Orang	55,000,000

d.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1750 Orang	160,000,000
e.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	43.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	178,643,860
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA-NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	2.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA-NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	1,954,990,439
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	1 Kali	2.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	1 Kali	1,954,990,439

a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	65,000,000	
b.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	500.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	95,000,000	

c.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64 Orang	799,901,327	
d.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	800,000,000	

e.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 Laporan	195,089,112
F.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Konflik yang ditangani	100%	269.463.586	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Konflik yang ditangani	100%	2,091,439,832
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	10 Rekomendasi	269.463.586	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	10 Rekomendasi	2,091,439,832
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	2 Dokumen	375.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	75,000,000

			serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun							
b.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	375.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	75,000,000
c.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	50 Orang	375.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	500,000,000

			serta Penanganan Konflik di Daerah								
d.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	97.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	601,399,936	
e.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	2 Laporan	375.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	175,039,896	

			Konflik di Daerah								
f.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	170.963.586	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	665,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak adanya usulan dari masyarakat, dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Usulan					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang diinginkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 didasarkan kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah ***Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan***. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yaitu pembinaan politik dalam negeri melalui strategi :

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan pemerintahan Umum dengan sasaran program dan indikator kinerja program yaitu :

- a. Meningkatkan kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi
- b. Simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal

- c. Aparatur pusat dan daerah, tim terpadu penanganan konflik sosial yang mampu melaksanakan secara optimal deteksi dini dan cegah dini serta pengawasan orang asing dan lembaga asing

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berlandaskan misi yang telah ditetapkan , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 menetapkan tujuan “ Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol Yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM dengan indikator sebagai berikut :

1. Indeks Harmoni Indonesia
2. Indeks Demokrasi Indonesia
3. Persentase Pemilih pada Pilpres
4. Persentase Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Indeks Ketahanan Nasional

Sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi
5. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan

3.3 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi

dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan tahun 2024 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 dibawah ini:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cata-tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		Kabupaten Pesisir Selatan			Pendapatan Transfer			
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Kabupaten Pesisir Selatan		5.870.708.145	Pendapatan Transfer			14,573,595,409
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	3.370.708.145	Pendapatan Transfer		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	4,692,307,571
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	37.451.500	Pendapatan Transfer		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	130,000,000
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen	37.451.500	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	011	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen	20,000,000
8	011	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20,000,000
8	011	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000
8	011	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000
8	011	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	2.444.462.171	Pendapatan Transfer	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,524,775,691
8	011	2.02	0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	20 Orang/bulan	2.324.102.171	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,345,766,181
8	011	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	120.360.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139,009,510
8	011	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	20,000,000

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

					SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,000,000
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	0	Pendapatan Transfer	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125,000,000
8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20,000,000
8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000
8	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20,000,000
8	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000
8	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan	Kabupaten	1 Laporan	0	Pendapatan	Jumlah Laporan	20,000,000

	1	1	3	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan			Transfer		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
8	0 1	0 1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000
8	0 1	0 1	2.0 3	000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	20,000,000
8	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	0	Pendapatan Transfer		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180,000,000
8	0 1	0 1	2.0 5	000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50,000,000
8	0 1	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Paket	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10,800,000
8	0 1	0 1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000
8	0 1	0 1	2.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000
8	0 1	0 1	2.0 5	000 4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	0	0	2.0	000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Orang	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	20.000.000
8	0	0	2.0	000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20.000.000
8	0	0	2.0	000	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Orang	0	Pendapatan Transfer	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	20.000.000
8	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Orang	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000
8	0	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Orang	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	20.000.000
8	0	0	2.0	000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Orang	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000
8	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	308.499.835	Pendapatan Transfer	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	503,951,959
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Paket	5.540.877	Pendapatan Transfer	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,433,595

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Paket	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20,000,000
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Paket	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20,000,000
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Paket	23.133.562	Pendapatan Transfer	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23,657,691
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	5 Paket	22.948.396	Pendapatan Transfer	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	31,883,983
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	11,009,000
8	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	10.164.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,631,370
8	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Laporan	246.713.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292,336,320
8	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40,000,000
8	0	0	2.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35,000,000

8	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	24.836.250	Pendapatan Transfer		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	344,687,736
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	40,000,000
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	40,000,000
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	28 Unit	18.481.500	Pendapatan Transfer		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	92,743,980
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	3 Unit	6.354.750	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111,943,756
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Unit	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000
8	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Unit	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20,000,000
8	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Unit	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20,000,000

8	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	363.718.389	Pendapatan Transfer		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	388,856,897
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	37.401.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	44,264,800
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	0	Pendapatan Transfer		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40,000,000
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	326.317.389	Pendapatan Transfer		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	284,592,097
8	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	191.740.000	Pendapatan Transfer		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	515,035,288
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	41.090.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,649,288
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Pesisir Selatan	6 Unit	43,050,000	Pendapatan Transfer		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,000,000

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Pesisir Selatan	10 Unit	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15,000,000
8	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Pesisir Selatan	17 Unit	7.600.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14,250,000
8	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40,000,000
8	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Unit	100.000.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300,136,000
8	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	0	Pendapatan Transfer	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10,000,000
8	0	0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	Kabupaten Pesisir Selatan	500 Orang	922.199.800	Pendapatan Transfer	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	1,735,462,254
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kabupaten Pesisir Selatan	21 Upacara	922.199.800	Pendapatan Transfer	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1,735,462,254
8	0	0	2.0	000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	499.800.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi	50,000,000

					Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	
8	0 1	0 2	2.0 1	000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	50,000,000
8	0 1	0 2	2.0 1	000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	25 Orang	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95,000,000
8	0 1	0 2	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	500 Orang	118.000.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	327,967,944

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Laporan	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	85,000,000
8	0	0	2.0	000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kabupaten Pesisir Selatan	20 Keluarga	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180,000,000
8	0	0	2.0	000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	500.000	Pendapatan Transfer	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	10,000,000
8	0	0	2.0	000	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	73 Orang	800.000.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Paskibraka	907,494,310

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

8	0 1	0 2	2.0 1	000 9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	400.000	Pendapatan Transfer		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	10,000,000
8	0 1	0 2	2.0 1	001 0	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	400.000	Pendapatan Transfer		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	10,000,000
8	0 1	0 2	2.0 1	001 1	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Pesisir Selatan	73 Orang	400.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	10,000,000
8	0 1	0 3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman Politik dikalangan masyarakat/aparat ur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	1.235.836.614	Pendapatan Transfer		Persentase Pemahaman Politik dikalangan masyarakat/aparat ur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	3,630,751,453
8	0 1	0 3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Laporan	1.235.836.614	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala	3,630,751,453

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

						daerah						daerah	
8	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	400.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	150,000,000
8	0 1	0 3	2.0 1	000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	400.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	50,000,000
8	0 1	0 3	2.0 1	000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Kabupaten Pesisir Selatan	1100 Orang	500.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	2,000,000,000

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	013	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	22 Orang	1.233.536.614	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,109,608,573
8	013	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Perwakilandan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Laporan	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Perwakilandan	301,142,880

					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	0 1	0 3	2.0 1	000 6	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Kegiatan	500.000		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	20,000,000
8	0 1	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	Kabupaten Pesisir Selatan	83 Ormas	70.000.000	Pendapatan Transfer	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	448,643,860
8	0 1	0 4	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	Kabupaten Pesisir Selatan	83 Ormas	70.000.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	448,643,860
8	0 1	0 4	2.0 1	000 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	35,000,000
8	0 1	0 4	2.0 1	000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	20,000,000

					Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun						Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	
8	0 1	0 4	2.0 1	000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	13 Orang	500.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55,000,000
8	0 1	0 4	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	90 Orang	25.000.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	160,000,000
8	0 1	0 4	2.0 1	000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Laporan	43.500.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	178,643,860
8	0 1	0 5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	2.500.000	Pendapatan Transfer		Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	1,954,990,439

						Budaya						Budaya	
8	015	0	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Kali	2.500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	1,954,990,439
8	015	0	2.01	0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	65,000,000
8	015	0	2.01	0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	95,000,000
8	015	0	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Kabupaten Pesisir Selatan	60 Orang	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	799,901,327

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8	015	0	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	60 Orang	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800,000,000
8	015	0	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Laporan	500.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	195,089,112

8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang ditangani	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	269.463.586	Pendapatan Transfer	Persentase Konflik yang ditangani	2,091,439,832
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	Kabupaten Pesisir Selatan	10 Rekomen dasi	269.463.586	Pendapatan Transfer	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	2,091,439,832
8	0	0	2.0	000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	375.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	75,000,000
8	0	0	2.0	000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	375.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	75,000,000

					Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	
8	0 1	0 6	2.0 1	000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	60 Orang	375.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500,000,00
8	0 1	0 6	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	60 Orang	97.000.000	Pendapatan Transfer		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	601,399,936

8	0 1	0 6	2.0 1	000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Laporan	375.000	Pendapatan Transfer	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	175,039,896
8	0 1	0 6	2.0 1	000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Dokumen	170.963.586		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	665,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan															
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Tahun + 1
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1					
					Sebelum		Sesudah								
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8						Rp. 5.509.908.585					Rp. 5.509.908.585	Rp. 5.420.350.835		Rp. 5.420.350.835	
8	01					Rp. 5.509.908.585					Rp. 5.509.908.585	Rp. 5.420.350.835		Rp. 5.420.350.835	
8	01	01				Rp. 3.324.909.514					Rp. 3.324.909.514	Rp. 3.144.575.453		Rp. 3.144.575.453	
8	01	01	2.01			Rp. 38.882.700					Rp. 38.882.700	Rp. 28.252.400		Rp. 28.252.400	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				Rp. 38.882.700	Rp. 28.252.400		Rp. 28.252.400	
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Rp. 2.539.003.208	Rp. 2.550.118.520		Rp. 2.550.118.520	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				Rp. 2.482.963.208	Rp. 2.482.963.520		Rp. 2.482.963.520	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				Rp. 56.040.000	Rp. 67.155.000		Rp. 67.155.000	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																									
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1											
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun N	Tahun N														
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)									
8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa - Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa - Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa - Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa - Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa - Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
8	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dibidang Pegawai	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa - Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0008	Penindahan Tugas ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pestisr Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa																		

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan															
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Tahun - 1
				Tahun - 1	Sebelum				Tahun N				Tahun - 1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 221.041.941					Rp. 221.041.941	Rp. 153.611.207				Rp. 153.611.207
8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 6.276.811					Rp. 6.276.811	Rp. 4.275.444				Rp. 4.275.444
8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 22.536.863					Rp. 22.536.863	Rp. 26.391.116				Rp. 26.391.116
8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 22.911.767					Rp. 22.911.767	Rp. 22.467.647				Rp. 22.467.647
8 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa								Rp. 1.800.000				Rp. 1.800.000
8 01 01 2.06 0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 5.940.000					Rp. 5.940.000	Rp. 5.940.000				Rp. 5.940.000
8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 163.376.500					Rp. 163.376.500	Rp. 92.737.000				Rp. 92.737.000
8 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
8 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesh Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 351.261.665					Rp. 351.261.665	Rp. 282.944.426				Rp. 282.944.426
8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 42.547.200					Rp. 42.547.200	Rp. 38.009.400				Rp. 38.009.400
8 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa												
8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab, Pestisid Belatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 308.714.465					Rp. 308.714.465	Rp. 244.935.026				Rp. 244.935.026

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							Tahun + 1						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1							
									Sebelum				Jumlah (Rp)			Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penetapan Kelembagaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Rp. 215.000.000				Rp. 215.000.000	Rp. 257.977.500				Rp. 257.977.500	
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kelembagaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa														
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa														
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa														
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kelembagaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa			Rp. 85.000.000		Rp. 85.000.000		Rp. 152.000.000							Rp. 152.000.000
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelembagaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa														
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa			Rp. 130.000.000		Rp. 130.000.000		Rp. 105.977.500							Rp. 105.977.500
Jumlah										Rp. 6.609.908.686			Rp. 6.609.908.686		Rp. 6.420.360.836					Rp. 6.420.360.836	



BAB V

PENUTUP

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh pemangku kepentingan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 serta untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan demi menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI